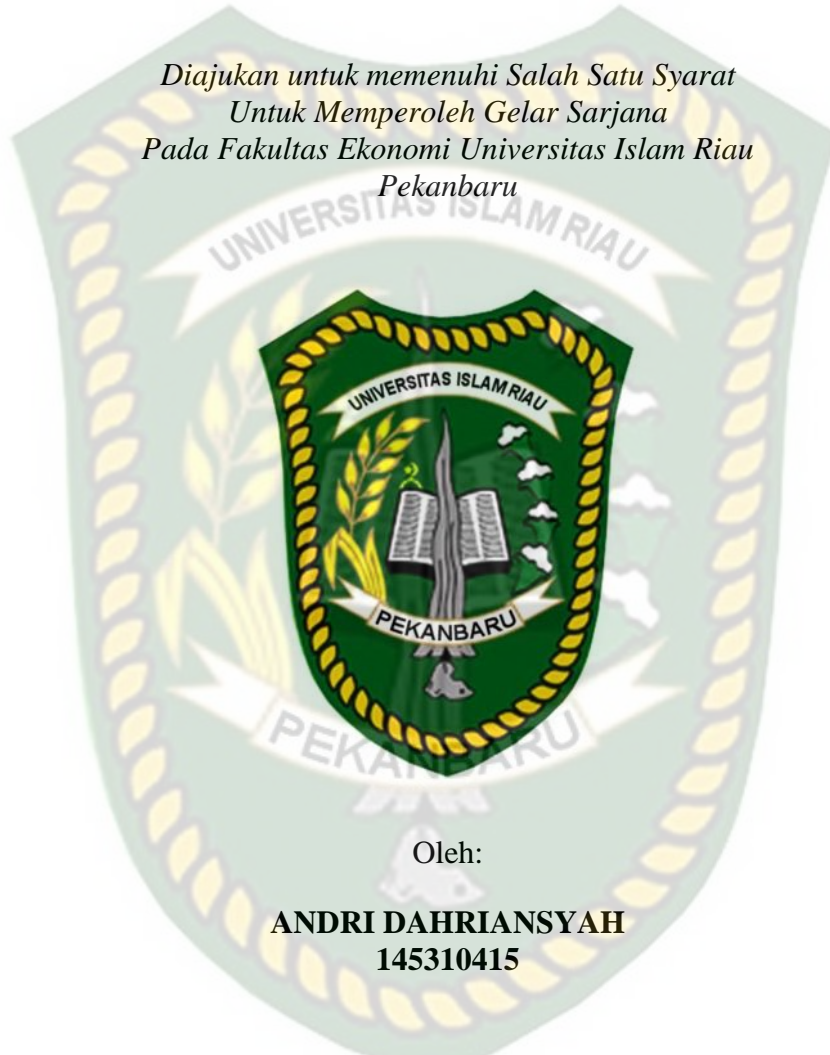


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN**

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



Oleh:

**ANDRI DAHRIANSYAH
145310415**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan Telp.
Telp (0761) 674681 Fax (0761) 674834 PEKANBARU -28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDRI DAHRIANSYAH
NPM : 145310415
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI-SI
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan di Kantor
Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

Disahkan Oleh :

PEMBIMBING I

Dr.H.ZULHELMI, SE.,M.Si,AK,CA

PEMBIMBING II

YUSRAWATI,SE.M.Si

Mengetahui :

DEKAN

Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA

KETUA PRODI AKUNTANSI SI

Dra.Eny Wahyuningsih, M., Si., AK., CA

ANALISIS PENERAPAS AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN

**Oleh
Andri Dahriansyah**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui penerapan Akuntansi Pemerintahan yang dibuat Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku yaitu PP No.71 Tahun 2010.

Atas Permasalahan yang ditemui, penulis berupaya memperoleh data-data yang telah disajikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan pengurus Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang telah disusun oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Teknik Pengumpulan data melalui tahap wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif.

Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap proses akuntansi pemerintahan dan juga laporan keuangan di kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun”** Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari penulisan skripsi ini, penulisan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi

tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua ku, Papaku Agus Salim dan Mamaku Neneng Dahlia (rahimullah) serta Bang Adi Wahyudi dan Kak Lena, Kak Lia Anggia dan Bang Albert, untuk semua abang, kakak dan adik-adik sepupuku, seluruh keluarga besar dari papa dan mama, terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan baik moril maupun materil dan segala-galanya kepada ananda selama ini.
2. Bapak Drs. Abrar, M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIR
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si. Ak. CA, Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIR
4. Bapak Dr.H.Zulhelmy, SE.,M.Si,Ak,CA, selaku dosen pembimbing I yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.

5. Ibu Yusrawati,SE.M.Si, selaku dosen pembimbing II yang tak pernah lelah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan sehingga karya ilmiah ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ekonomi UIR yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus.
7. Terimakasih untuk sahabat-sahabat yang terbaik, Naico Rassaki Pamalayu, Gerry Lumban Tobing, Alberto Adhetiva Ketrian , Defi Amalia Jusman Nisa Fitri Loviyarni, Nurmila Sari untuk semangatnya, kehebohannya, dan untuk segala kenangannya. Meskipun dengan jalan yang berbeda-beda semoga kesuksesan selalu untuk kita.
8. Terima kasih Untuk keluarga besar Asal Kau Bahagia (AKB).
9. Untuk teman-teman angkatan 2014 di Fakultas Ekonomi UIR dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan support selama ini.
10. Untuk seluruh pihak Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

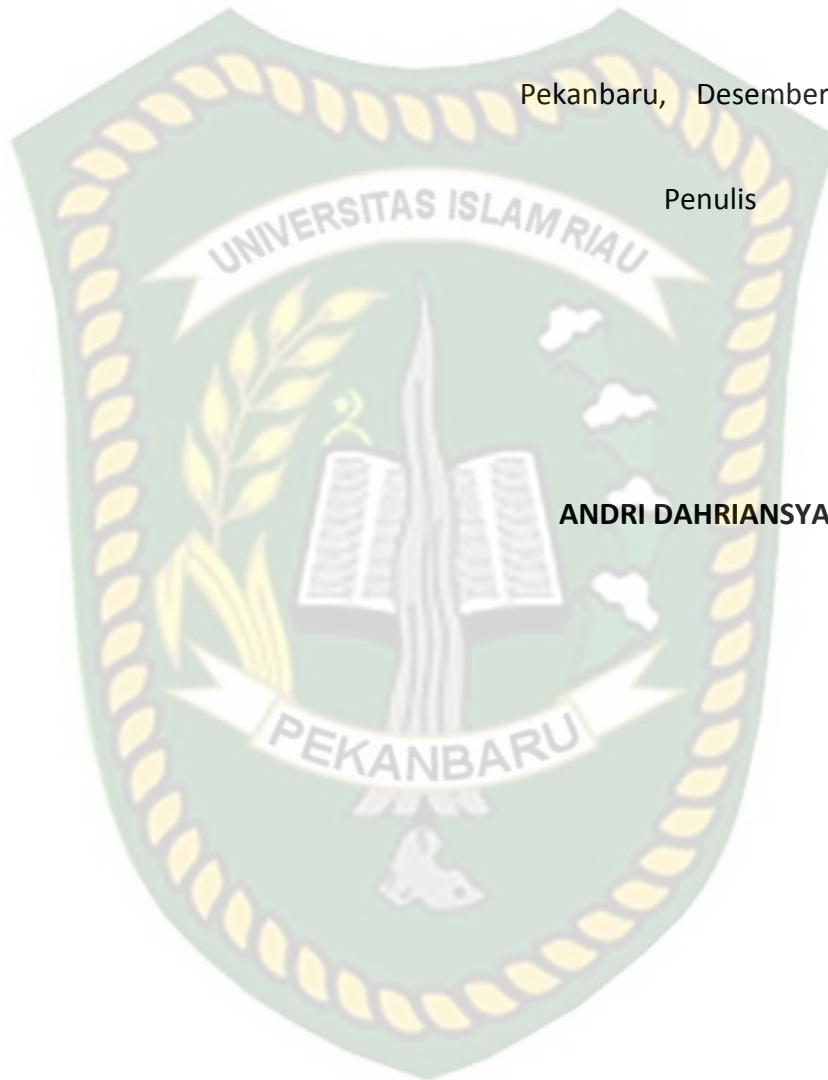
Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum **warohmatullahi wabarokatuh**

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

ANDRI DAHRIANSYAH



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI SKRIPSI

| | halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 9 |
| A. Telaah Pustaka..... | 9 |
| 1. Standar Akuntansi Pemerintahan..... | 9 |
| 2. Standar Akuntansi Berbasis Akrua..... | 11 |
| 3. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua..... | 13 |
| 4. Kendala Penerapan Basis Akrua..... | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Strategi Penerapan SAP Akrual..... | 15 |
| 6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010..... | 17 |
| a) Laporan Realisasi Anggaran..... | 17 |
| b) Laporan Operasional..... | 20 |
| c) Laporan Perubahan Ekuitas..... | 23 |
| d) Neraca..... | 24 |
| e) Catatan Atas Laporan Keuangan..... | 31 |
| B. Hipotesis..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| B. Jenis dan Data Sumber..... | 35 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 36 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN..... | 37 |
| A. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun..... | 37 |
| B. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun | 38 |
| C. Visi dan Misi..... | 39 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| A. Proses Akuntansi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun..... | 40 |
| B. Proses Akuntansi Menurut PP No.71 Tahun 2010..... | 46 |
| BAB VI PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |
| LAMPIRAN..... | 64 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|------------------------------------|----|
| Tabel V.1 | Buku Kas Umum..... | 42 |
| Tabel V.2 | Buku Besar Kas..... | 43 |
| Tabel V.3 | Laporan Pertanggung Jawaban..... | 45 |
| Tabel V.4 | Transaksi..... | 46 |
| Tabel V.5 | Buku Besar..... | 47 |
| Tabel V.6 | Nercana Saldo..... | 48 |
| Tabel V.7 | Neraca Saldo Yang Disesuaikan..... | 48 |
| Tabel V.8 | Laporan Realisasi Anggaran..... | 49 |
| Tabel V.9 | Laporan Operasional..... | 53 |
| Tabel V.10 | Neraca..... | 55 |
| Tabel V.11 | Laporan Perubahan Ekuitas..... | 56 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran**
- Lampiran 2 Laporan Operasional**
- Lampiran 3 Neraca**
- Lampiran 4 Laporan Perubahan Ekuitas**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009)

Siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis didalam jurnal sebelum dipindahkan ke Buku Besar akun-akun. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi dan dua kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam Buku Besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat

menyusun Neraca Saldo. Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo. Tahap kelima menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran dimuka/pendapatan diterima dimuka (prepayment) atau transaksi yang masih harus dibayar atau yang masih harus diterima (accrual). Tahap keenam menyusun Neraca Saldo Disesuaikan. Tahap ketujuh menyusun laporan keuangan. Tahap kedelapan menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Tahap kesembilan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Langkah-langkah optional jika worksheet disusun, maka tahap ke-4, ke-5, dan ke-6 dimasukkan dalam worksheet. Jika ayat jurnal pembalik (reversing entry) disusun, maka ayat jurnal pembalik akan terjadi antara tahap 9 dan 1. Ayat jurnal koreksi, bila ada, seharusnya dibukukan sebelum ayat jurnal penutup, (Jalaluddin Ar-Rumi, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bias jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional. Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010, salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, dimana basis kas mengakui dan mencatat transaksi

pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban (Usman, 2014).

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Langelo, 2015).

PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah “standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah masih terdapat berbagai masalah dalam implementasinya. Penelitian Friya Rispa (2015) yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 secara keseluruhan yaitu laporan keuangan yang telah dibuat meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan yang belum disajikan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ningsih (2013) yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menyatakan jika Laporan arus kas pada Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum menyajikan Laporan Arus Kas, sedangkan dalam suatu instansi diharuskan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan pemisahan dalam pencatatan. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas hanya dicatat ke dalam buku kas umum.

Proses Akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun menggunakan basis data SAIBA dimana merupakan sistem akuntansi berbasis akrual, dimana SAIBA merupakan gabungan dari aplikasi kas bendahara dan BMN. Dari aplikasi kas bendahara dimulai dari pembuatan kwitansi, lalu melakukan pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang pencatatannya secara otomatis, pembuatan buku besar, pembuatan laporan. Hasil dari data aplikasi kas bendahara di impor ke dalam SAIBA, sedangkan BMN pencatatan khusus mengenai harga perolehan, penyusutan, barang masuk dan keluar, dan data dari BMN juga di impor ke dalam SAIBA. Perpaduan dari data tersebut menghasilkan laporan keuangan.

Penerapan Akuntansi pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 1), Laporan Operasional (Lampiran 2), Neraca (Lampiran 3) dan Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 4), Laporan Keuangan yang

belum disajikan adalah Catatan Atas Laporan. Bila CALK tidak dibuat akan berdampak pada kesalahpahaman pembaca laporan keuangan karena tidak semua pembaca itu dari kalangan akuntansi yang tidak terlalu paham jika hanya ada data berupa angka saja. Pada Laporan Operasional juga tidak dibuatnya selisih/lebih dari surplus kegiatan operasional selama satu periode pelapor yang bisa meningkatkan tingkat kesalahan data jika tidak teliti saat dilakukannya input data.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil Judul " Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah penelitian yaitu :

Bagaimana Penerapan Akuntansi keuangan Pemerintah Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Akuntansi Pemerintahan di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

2 Manfaat Penelitian

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan sehubungan dengan analisis penerapan akuntansi.

b) Bagi Kantor

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penerapan akuntansi pemerintahan pada kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

c) Manfaat Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Telaah Pustaka dan Hipotesis

Yang terdiri dari landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis..

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari Desain Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Validitas dan Realibilitas Data.

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian

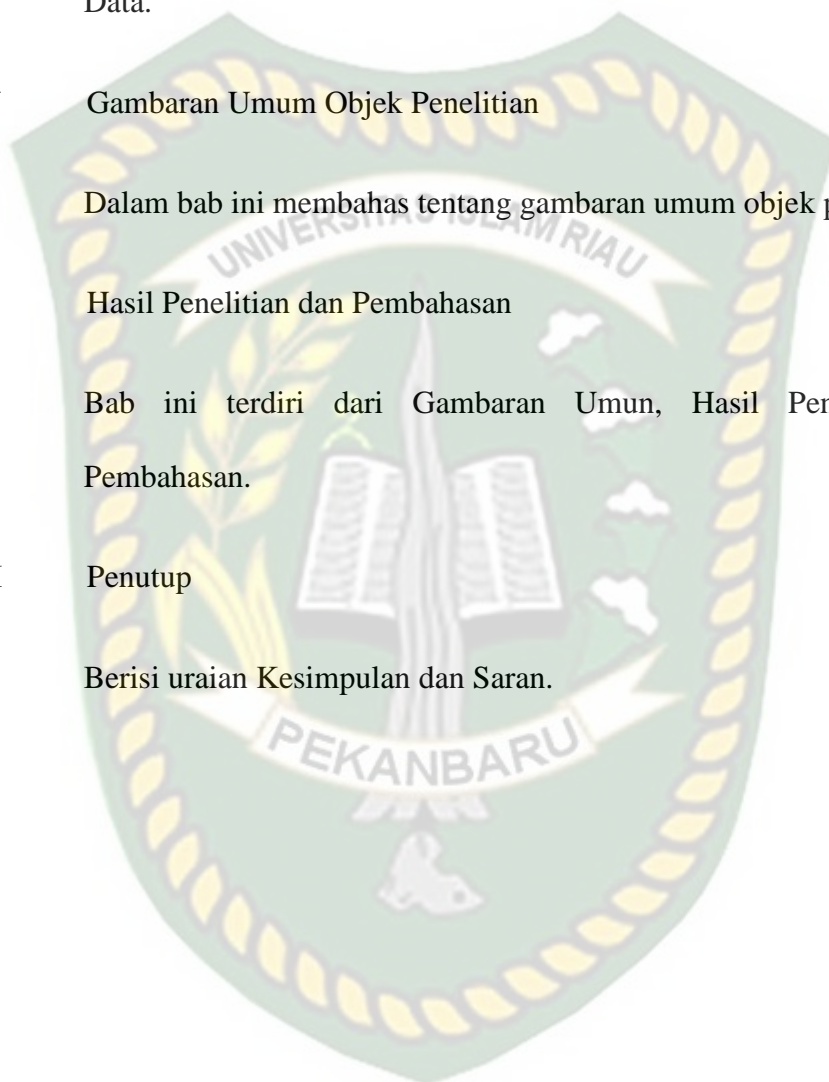
Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum, Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

BAB VI Penutup

Berisi uraian Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Mahmudi(2011) menyatakan bahwa Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akruaI (cash toward accrual). Secara umum basis kas pada akuntansi setelah lama ditinggalkan oleh para penyelenggara laporan akuntansi dan telah beralih ke basis akruaI.

Menurut Mahsun (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Adapun definisi menurut Indra Bastian (2010) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan Ritonga (2004) bahwa standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan et al, 2009: 123). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan. Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan

kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas serta dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.

Tudor dan Mutiu, (2006) berpendapat mengenai definisi basis akrual yaitu pada basis akrual transaksi dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas (atau piutang) sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau jasa.

Sedangkan Laughlin (2012) mendefinisikan akuntansi akrual adalah metode pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan,

yang akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan seharusnya dicatat.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa, apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrual, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dari uraian di atas, perbedaan yang paling mendasar dari komponen laporan keuangan antara PP No 64 tahun 2005 dengan PP no 71 tahun 2010 terletak pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) dan Laporan Operasional (LO). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebenarnya bukan hal yang baru, sebab laporan ini, dulunya (ketika akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis kas) merupakan bagian dari laporan surplus/defisit. Namun dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca dan laporan operasional menggunakan basis akrual (Hafiz Tanjung, 2012). Begitu juga yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis

akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan.

3. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan basis akrual maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih komprehensif dibandingkan basis kas menuju akrual. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure*. Selain itu laporan keuangan berbasis akrual juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah sudah dimulai sejak tahun 2015 sesuai dengan peraturan pemerintah, (Mukhtaromin, Widyaiswara Madya Pusdiklat AP, 2014).

4. Kendala Penerapan Basis Akrual

Untuk konteks di Indonesia Ritonga (2010) mengatakan bahwa untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang

mendukung, sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan SDM yang berkompeten dan professional dalam pengelolaan keuangan.
- b. Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, proses baku penyusunan di dalam penyusunan suatu standar akuntansi, termasuk untuk menerapkan basis akuntansi, harus dilaksanakan dengan baik dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar standar yang dihasilkan lebih berkualitas.
- c. Tersedianya system teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
- d. Adanya system penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih basis kas sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat dibandingkan.
- e. Dari kendala-kendala diatas memunculkan persyaratan, yaitu harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan basis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang panjang.

Kemudian Bastian (2006) menambahkan, beberapa masalah aplikasi basisakrual yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
- b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
- c. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
- d. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

5. Strategi Penerapan SAP Akrual

Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel II.1

Tabel Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual

| Tahun | Agenda |
|-------|---|
| 2010 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 2. Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual |

| | |
|------|--|
| | 3. Sosialisasi SAP berbasis akrual |
| 2011 | |
| 2012 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 2. Pengembangan system akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail requirement) 3. Pengembangan kapasitas SDM |
| 2013 | <p>2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piloting Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara 2. Review, evaluasi dan penyempurnaan system 3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Parallel rundan konsolidasi seluruh LK 2. Review, evaluasi dan penyempurnaan system 3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2015 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Penuh 2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |

Peluang yang Dimiliki Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014) mengatakan bahwa dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki peluang antara lain sebagai berikut:

- a. Amanat UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 serta rekomendasi BPK dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

- b. Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara.
- c. Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju AkruaI.
- d. Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP).
- e. Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi berbasis Kas Menuju AkruaI.
- f. Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
- g. Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh kementerian negara/lembaga.
- h. Dapat dimaifaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan pengecekan ulang dan pendampingan penyusunan laporan keuangan.
- i. Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.
- j. Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan Bank Dunia.

6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

Dalam standar akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI yang berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 terdapat 7 komponen laporan keuangan pokok yang harus dilaporkan. Masing-masing laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa/lebih kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (KSAP, 2012).

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA harus didasarkan pada :

1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menurut PSAP No. 2 paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening kas umum/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

2. Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), atau melalui bendahara pengeluaran. Jika pengeluaran dilakukan oleh BUN/BUD maka belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sedangkan jika pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

3. Akuntansi Pembiayaan

Berdasarkan PSAP No. 2 paragraf 50, pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil privatisasi BUMN/BUMD. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN/BUMD.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan azas bruto. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

4. Transfer

Transfer adalah Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil (Rasdianto dkk, 2015).

b) Laporan Operasional

Pada Kerangka Konseptual PP no 71 tahun 2010 paragraf 78-79 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi

fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi,

antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
 2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
 3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.
- c) Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan PSAP No.1 paragraf 101-102, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

d) Neraca

Pada Kerangka Konseptual PP no. 71 tahun 2010 paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut:

1. kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek.
3. Piutang pajak dan bukan pajak.
4. Persediaan.
5. Investasi jangka panjang.
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang.
9. Ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Rasdianto dkk, 2015). Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

a. Aset Lancar

PSAP No. 1 paragraf 54-55 menyatakan aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3-12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

b. Aset Nonlancar

PSAP No.1 paragraf 56-66 menyatakan bahwa aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklarifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atau pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi nonpermanen dan investasi permanen (Rasdianto dkk, 2015). Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Rasdianto dkk, 2015). Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah.
- b) Peralatan dan mesin.
- c) Gedung dan bangunan.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Aset tetap lainnya.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran (Rasdianto dkk, 2015). Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset dilakukan apabila ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke tangan Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset tergantung dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - i. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ii. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - iii. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

6. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola (membangun sendiri) meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan untuk aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah (Rasdianto dkk. 2015). Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek

PSAP No 1 paragraf 75-77 menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai

merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

PSAP No. 1 paragraf 78-80 menyatakan bahwa kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Kewajiban tersebut bermaksud didanai kembali (*refinancing*) sebagai kewajiban jangka panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian atau penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Ekuitas

PSAP No.1 paragraf 84-85 menyatakan bahwa ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas diatas, suatu entitas dapat menentukan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (Ritonga, 2010).

Secara umum, susunan CaLK sebagaimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;

- a. Kebijakan akuntansi yang penting;
- b. Entitas pelaporan;
- c. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- d. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- e. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
- f. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- g. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
- h. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
- i. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
- j. Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- k. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah)

menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive* atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di

dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

B. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Pada laporan keuangan yang dibuat kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berdasarkan PP no 71 tahun 2010.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Lokasi yang dituju untuk diteliti oleh peneliti adalah Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Data primer yaitu, data dan informasi yang dikumpulkan dari kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun masih dalam bentuk baku dan masih butuh pengolahan lebih lanjut dan jenis data primer ini antara lain yaitu data yang diperoleh dari bendahara kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sudah jadi antara lain berupa struktur organisasi kantor dan laporan keuangan.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam kantor yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penerapan standar akuntansi

pemerintahan yang sesuai dengan PP no 71 tahun 2010. Wawancara dilakukan dengan bagian keuangan dan pimpinan kantor.

2. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data sekunder sehubungan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan pada kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang berhasil diperoleh dikelompokkan dan kemudian di analisis data. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menelaah dan menguraikan data yang diperoleh dan kemudian membandingkan dengan berbagai teori yang mendukung pembahasan. Hasil perbandingan tersebut diambil satu kesimpulan yang ringkas dari hasil pembahasan, selanjutnya dikemukakan beberapa saran yang berguna untuk pihak kantor.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Imigrasi

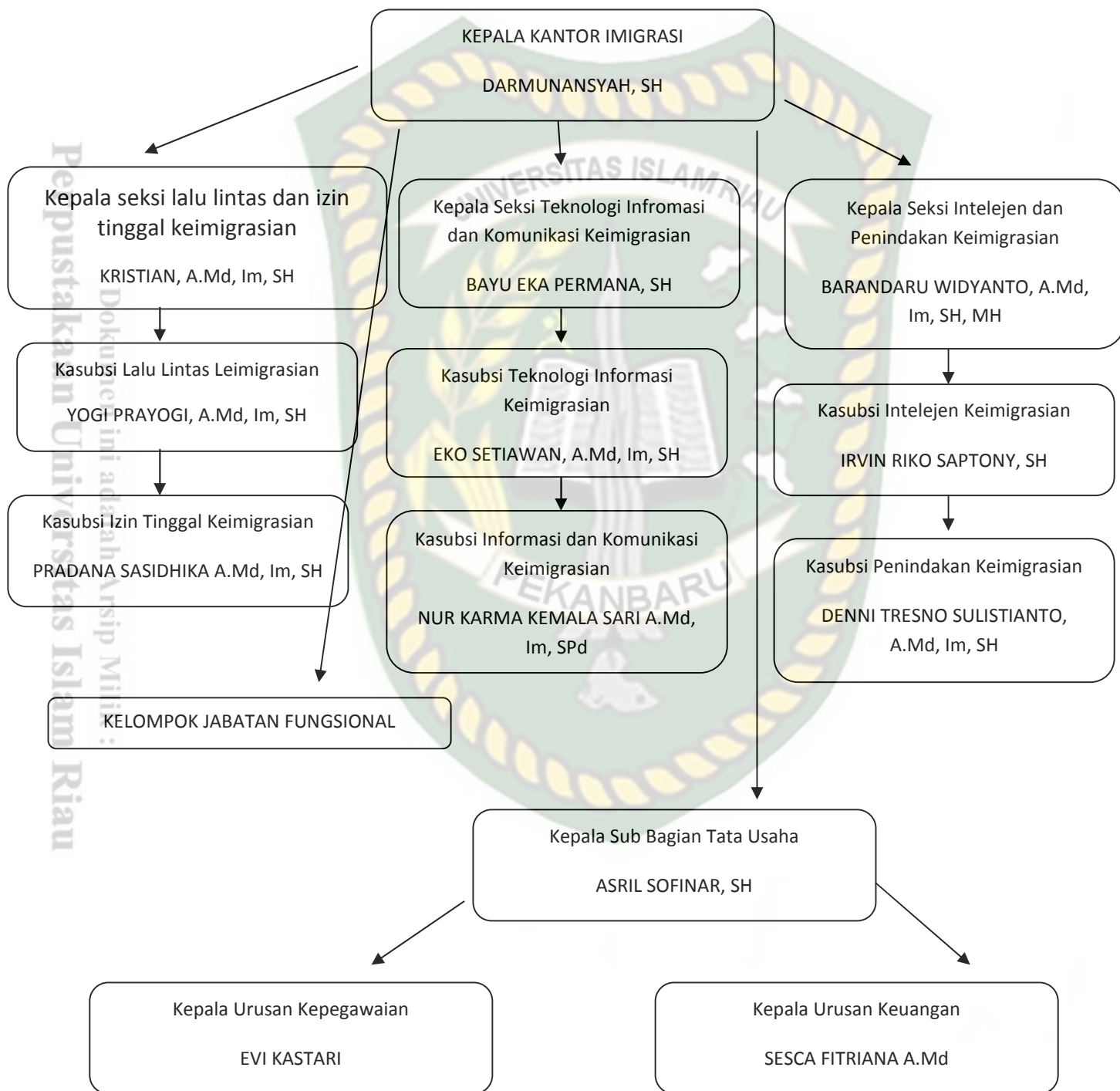
Sejarah awal berdirinya kantor imigrasi di Indonesia diawali pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Lalu dengan perkembangan zaman sampai lah Indonesia ke zaman yang dikenal dengan RIS (Republik Indonesia Serikat) dimana pada zaman itu terjadilah serah terima dinas imigrasi ke tangan Indonesia pada 26 Januari 1950.

Berpindahnya dinas imigrasi ke tangan Indonesia tidaklah sempurna, oleh karena itu dinas imigrasi telah melalui beberapa kali perubahan kebijakan yang diatur oleh UU, terakhir kali kantor imigrasi perubahan kebijakan diatur dalam UU NO 6 TAHUN 2011.

Fungsi dari kantor Imigrasi adalah pengaturan bebas visa secara resiprokal, dan pengaturan bisa on arrival (VOA), pengaturan visa khusus bagi turis lanjut usia (Lansia), pengaturan fasilitas APEC business travel card (ABTC), Pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing, kerja sama keimigrasian baik di dalam negeri maupun luar negeri, pendeportasian imigran ilegal, kasus pemalsuan paspor-paspor untuk TKI, pencegahan dan penangkalan imigran gelap, dan Clearance House (CH), yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa.

B. Struktur Organisasi

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



C. Visi dan Misi

Dengan visi misi sebagai berikut :

a. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

b. Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia

c. Motto

Melayani dengan tulus.

d. Janji Layanan.

1. Kepastian Persyaratan
2. Kepastian Biaya.
3. Kepastian Waktu Penyelesaian.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Akuntansi di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Proses Akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TanjungBalaiKarimundimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan selanjutnya adalah menjurnal transaksi.Berikut adalah gambar aplikasi yang digunakan untuk merekam kuitansi Pembayaran :

The screenshot displays a web-based application for recording payment receipts. The interface is titled "RUH Pembebanan Akun" and is for the "KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN". The form includes the following fields and values:

- Kode Satker:** 2018 408112 0001
- Bendahara:** 000 Bendahara Pengeluaran
- Periode:** Bulan Desember, Tanggal 16-12-2019 s/d 16-12-2019
- Kuitansi Pembayaran:**
 - TA:** 2018
 - Nomor Bukti:** 000687 / RM-12/2018
 - Mata Anggaran:** 522111 10
 - Sudah Terima Dari:** Pejabat Pembuat Komitmen
 - Jumlah Uang:** 19.624.816
 - Terbilang:** (empty)
 - Untuk Pembayaran:** Biaya langganan listrik Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun tagihan bulan Desember 2018 untuk pemakaian bulan November 2018.
 - Kota:** KARIMUN, Tanggal 04-12-2018
 - Perusahaan Penerima:** (empty)
 - Nama Penerima:** Kopectel Karimun, NPWP: (empty)
 - PPK:** EKO SETIAWAN, A.Md.Im,Si (198803012007011005), Penerima Barang: Asri Sofinar, SH (196402031988031001)

Buttons at the bottom include "Pajak", "Simpan", and "Batal".

Setelah direkam dan menjadi kuitansi , barulah kuitansi tersebut dimasukkan kedalam transaksi seperti berikut ini :

Transaksi Bendahara

Kode Satker: 2018 408112 0001 KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN
 Bendahara: 000 Bendahara Pengeluaran
 Periode: Bulan Desember Tanggal 16-12-2019 s/d. 16-12-2019

| Tanggal | No Bukti | Kode | Uraian | Rupiah | No SP2D | Nodrrp |
|------------|----------|------|--|-------------|-------------|--------|
| 03-12-2018 | 001150 | 26 | SPM LS Pihak 3 Gaji induk pegawai bulan Desember | 116.895.500 | 18137150200 | |
| 04-12-2018 | 001134 | 07 | PU Bank GUP RM & PNBP | 61.555.318 | | |
| 04-12-2018 | 001135 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000684 Untuk :Biaya la | 693.000 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001136 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000685 Untuk :Biaya la | 50.000 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001137 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000686 Untuk :Biaya la | 50.000 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001138 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000687 Untuk :Biaya la | 19.624.816 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001139 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000688 Untuk :Biaya la | 34.070 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001140 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000689 Untuk :Biaya la | 322.500 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001141 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000690 Untuk :Biaya la | 91.700 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001142 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000691 Untuk :Biaya la | 451.400 | 18137130300 | 000055 |
| 04-12-2018 | 001143 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000692 Untuk :Biaya pe | 6.818.184 | 18137130300 | 000056 |
| 04-12-2018 | 001144 | 08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000693 Untuk :Biaya pe | 3.233.716 | 18137130300 | 000056 |

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---|
| Saldo Kas Bank | 0 | Saldo BP UP | 0 |
| Saldo Kas Tunai | 0 | Saldo Pajak | 0 |
| Saldo Kas UM | 0 | Saldo BP LS Bend | 0 |
| Saldo Kas BPP | 0 | Saldo BP Lain | 0 |

Setelah kuitansi direkam kedalam transaksi maka kuitansi tersebut akan mengurangi anggaran. Kemudian barulah dibuat Buku Kas Umum sebagai berikut:

Tabel V.1
Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun
Buku Kas Umum

| Tanggal | No. B/K | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
|------------|---------|--|------------|------------|------------|
| | | Saldo | | | Awal |
| | | | | | 74,805,039 |
| 04-12-2018 | 001134 | PU Bank GUP RM & PNBK | 61,555,318 | 61,555,318 | 74,805,039 |
| 04-12-2018 | 001135 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000684 untuk : Biaya langganan jasa pengiriman surat dinas kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun | | 693,000 | 74,116,039 |
| 04-12-2018 | 001136 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000685 untuk : Biaya langganan Koran Harian Sinar pagi tagihan bulan November 2018 | | 50,000 | 74,066.039 |

Tabel V.1 menunjukkan pencatatan pada Buku Kas Umum yang dilakukan pada kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Lalu dipindahkan ke Buku Besar akun-akun. Adapun Buku Besar yang ditampilkan oleh kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel V.2
Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun
Buku Besar Kas

| TGL POS | TGL DOK | JNS DOK | NODOK | BAESIWIL SATK | KPPN | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|------|----------------|--------|----------------|
| 18-08-17 | 18-08-17 | SP2DPL | 171371302002862 | 013063200408112 | 137 | Rp 58,040,000 | | Rp.58,040,000 |
| 22-08-17 | 22-08-17 | | 171371302002881 | | 137 | RP.41,949,000 | | RP.99,989,000 |
| | | | | | 137 | Rp.16,500,000 | | Rp.116,489,000 |
| | | | | | | Rp.116,489,000 | | Rp.116,489,000 |

Tabel V.2 menunjukkan pencatatan pada buku besar yang dilakukan pada kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi dan dua kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam Buku Besar per akun atau kode rekening. Tahap berikutnya membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Berikut adalah Laporan pertanggung Jawaban yang dibuat :

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Form LPJ Pengeluaran | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Desember 2018 | Tahun Anggaran 2018 |
|---------------------------------|--|--------------------------------|

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 Provinsi/Kab/Kota : (51) KOTA BATAM
 Satuan Kerja : (408112) KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN
 Alamat dan Telp. : JL.JENDERAL AHMAD YANI NO.105
 No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor Dokumen : DIPA-013.06.2.408112/2018
 Tanggal Dokumen : 05-12-2017
 Tahun Anggaran : 2018
 KPPN : (137) B A T A M

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:001274

| No. | Jenis Buku Pembantu | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. | BP Kas, BPP, dan UM Perjadin | 74.809.039 | 593.433.504 | 668.242.543 | 0 |
| | 1. BP Kas (tunai dan bank) | 74.809.039 | 593.433.504 | 668.242.543 | 0 |
| | 2. BP Uang Muka/Voucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. BP BPP (Kas pada BPP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin | 74.809.039 | 340.139.031 | 414.948.070 | 0 |
| | 1. BP UP *) | 74.809.039 | 106.196.410 | 181.005.449 | 0 |
| | 2. BP LS-Bendahara | 0 | 85.542.745 | 85.542.745 | 0 |
| | 3. BP Pajak | 0 | 5.303.338 | 5.303.338 | 0 |
| | 4. BP Lain-lain | 0 | 143.096.538 | 143.096.538 | 0 |

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

| | | |
|---|-----|-------|
| 1. Uang Tunai di brankas | Rp. | 0 |
| 2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening) | Rp. | 0 (+) |
| 3. Jumlah kas | Rp. | 0 |

III. Selisih Kas

| | | |
|--|-----|-------|
| 1. Saldo Akhir BP Kas (IA 1 kolom (6)) | Rp. | 0 |
| 2. Jumlah Kas (II.3) | Rp. | 0 (+) |
| 3. Selisih Kas | Rp. | 0 |

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

| | | |
|---------------------------|-----|-------|
| 1. Saldo UP | Rp. | 0 |
| 2. Kuitansi UP | Rp. | 0 (+) |
| 3. Jumlah UP | Rp. | 0 |
| 4. Saldo UP menurut UAKPA | Rp. | 0 (+) |
| 5. Selisih Pembukuan UP | Rp. | 0 |

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

- Tidak Ada --
- Tidak Ada --

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran /
 PPK atas nama KPA

DARMUNANSYAH, SH
 NIP. 196508131989031001

TANJUNG BALAI KARIMUN, 31-12-2018

Bendahara Pengeluaran,

SESCA FITRIANA, A.Md
 NIP 198805152009122004

Tabel V.3

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Laporan Saldo Rekening

| No | Nomor Rekening | Nama Rekening | Nama Bank | Kode Rek | Surat Izin | | Tanggal terakhir transaksi | Saldo | Ket |
|----|----------------|----------------------------|-----------|----------|---------------------------|------------|----------------------------|-------|-----|
| | | | | | No | Tanggal | | | |
| 1 | 0058757270 | BpG 137 Kanim Kelas II TBK | Bank BNI | 20 | S-656/W PB.31/KP.137/2015 | 08-06-2015 | | 0 | |

Laporan Saldo Rekening adalah bagian yang tidak terpisahkan dari LPJ bendahara.

Setelah membuat Laporan Pertanggung Jawaban barulah data-data yang telah diinput bisa dibuat laporan keuangannya..Saat menyusun laporan keuangannya Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun menggunakan basis data SAIBA dimana merupakan sistem akuntansi berbasis akrual, dimana SAIBA merupakan gabungan dari aplikasi kas bendahara dan BMN.

Dari aplikasi kas bendahara dimulai dari pembuatan kwitansi, lalu melakukan pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang pencatatannya secara otomatis, pembuatan buku besar, pembuatan laporan. Hasil dari data aplikasi kas bendahara di impor kedalam SAIBA, sedangkan BMN pencatatan khusus mengenai harga perolehan, penyusutan, barang masuk dan keluar, dan data dari BMN juga di impor kedalam SAIBA.

Pada laporan keuangan di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun ada 4 komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Seharusnya dalam sebuah instansi pemerintah diharuskan membuat laporan Catatan atas Laporan Keuangan karena laporan catatan laporan keuangan termasuk salah satu dari 5 komponen standar akuntansi pemerintahan.

2. Proses Akuntansi Menurut PP No.71 Tahun 2010.

Siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi, Seperti salah satu transaksi yang seharusnya dibuat oleh Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun. Dimana Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun membeli peralatan sebesar Rp.116,489,000. Lalu dari transaksi ini dilakukanlah penjurnalan sebagai berikut :

Tabel V.4
TRANSAKSI

| Nama Akun | Debet | Kredit |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Peralatan | Rp.116,489,000 | |
| Laporan Perubahan SAL | | Rp.116,489,000 |

Sumber : Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun

Setelah transaksi dicatat secara kronologis didalam jurnal, maka langkah selanjutnya ialah memasukan jurnal tersebut kedalam buku besar, seperti yang sudah dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun.

Tabel V.5

BUKU BESAR

| TGL POS | TGL DOK | JNS DOK | NO DOK | BAESIWIL SATK | KPPN | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|----------|---------|------------------|-----------------|------|-------------------|--------|-------------------|
| 31-01-17 | 31-01-17 | SP2DPL | 171371303000081 | 013063200408112 | 137 | Rp.28,978,230 | | Rp.28,978,230 |
| 06-03-17 | 06-03-17 | | 1713713030000442 | | 137 | RP.32,199,265 | | RP. 61,177,495 |
| 27-03-17 | 27-03-17 | | 1713713030000676 | | 137 | Rp.17,713,048 | | Rp.78,890,543 |
| | | | | | | Rp. 78,890,543 | | Rp. 78,890,543 |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

Tahap keempat menyusun Neraca Saldo. Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo. Tahap kelima menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran dimuka/pendapatan diterima dimuka (prepayment) atau transaksi yang masih harus dibayar atau yang masih harus diterima (accrual).

Tabel V.6**NERACA SALDO**

| TGL | URAIAN | SALDO | |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | | DEBIT (Rp) | KREDIT (Rp) |
| 31/12/2017 | Belanja Peralatan Kantor. | | 315,704,000 |
| | Belanja Tunjangan Umum PNS | | 49,755,000 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | | 1,417,658,000 |
| | Belanja Barang Operasional | | 100,000 |
| | Belanja Barang Non Operasional | | 699,836,000 |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

Tahap keenam menyusun. Neraca Saldo Disesuaikan.

TABEL V.7**NERACA SALDO YANG DISESUAIKAN**

| TGL | URAIAN | JUMLAH | |
|------------|--|----------------|----------------|
| | | DEBIT (Rp) | KREDIT (Rp) |
| 31/12/2017 | Kas | 90,000,000 | |
| | Persediaan | 414,619,447 | |
| | Peralatan dan Mesin | 12,482,507,636 | |
| | Akm penyusutan Peralatan dan Mesin | | 77,702,313 |
| | Gedung dan Bangunan | 9,721,498,000 | |
| | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | | 16,921,078 |

| | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | Aset lain-lain | 1,205,040,673 | |
| | Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain | | 1,129,070,423 |
| JUMLAH | | 23,913,665,756 | 1,223,693,814 |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

Tahap ketujuh menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen yaitu sebagai berikut ;

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Tabel V.8

Laporan Realisasi Anggaran

| No | Uraian | 2017 | | | |
|-----|-----------------------------|----------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran | % Realisasi Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Pendapatan Negara dan Hibah | | | | |
| A.I | Penerimaan Negara | | Rp.1,793,349,679 | Rp.1,793,349,679 | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| .1 | | | | | |
| A.I.1.a | Penerimaan Perpajakan | | | | |
| A.I.1.b | Penerimaan Negara Bukan Pajak | | Rp.1,793,349,679 | Rp.1,793,349,679 | |
| A.I.2 | Hibah | | | | |
| | Jumlah Pendapatan dan Hibah | | Rp.1,793,349,679 | Rp.1,793,349,679 | |
| B | Belanja Negara | | | | |
| B.I.1 | Rupiah Murni | Rp.5,545,104,000 | Rp.5,491,537,863 | (Rp.53,566,137) | 99.03 |
| B.I.1.a | Belanja Pegawai | Rp.2,031,510,000 | Rp.2,031,506,823 | (Rp.3,177) | 100.00 |
| B.I.1.b | Belanja Barang | Rp.3,347,004,000 | Rp.3,294,192,040 | (Rp.52,811,960) | 98.42 |
| B.I.1.c | Belanja Modal | Rp.166,590,000 | Rp.165,839,000 | (Rp.751,000) | 99.55 |
| B.I.1.d | Pembayaran Bunga Utang | | | | |
| B.I.1.e | Subsidi | | | | |
| B.I | Hibah | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|--|--|--|
| .1 .f | | | | | |
| B .1 .1 .g | Bantuan Sosial | | | | |
| B .1 .1 .h | Belanja Lain-Lain | | | | |
| B .1 .2 | Pinjaman dari Hibah | | | | |
| B .1 .2 .a | Belanja Pegawai | | | | |
| B .1 .2 .b | Belanja Barang | | | | |
| B .1 .2 .c | Belanja Modal | | | | |
| B .1 .2 .d | Pembayaran Bunga Utang | | | | |
| B .1 .2 .e | Subsidi | | | | |
| B .1 .2 .f | Hibah | | | | |
| B .1 .2 | Bantuan Sosial | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| .g | | | | | |
| B | | | | | |
| .I | Belanja Lain-Lain | | | | |
| .2 | | | | | |
| .h | | | | | |
| | Jumlah Belanja | Rp.5,545,104,000 | Rp.5,497,537,863 | (Rp.53,5666,137) | 99.03 |
| C | Pembiayaan | | | | |
| C | Pembiayaan dalam | | | | |
| .1 | Negeri (NETO) | | | | |
| C | Perbankan Dalam | | | | |
| .1 | Negeri | | | | |
| C | Non Perbankan Dalam | | | | |
| .2 | Negeri (NETO) | | | | |
| C | Pembiayaan Luar Negeri | | | | |
| .I | (NETO) | | | | |
| C | Penarikan Pinjaman | | | | |
| .I | Luar Negeri | | | | |
| I | | | | | |
| C | Pembayaran Cicilan | | | | |
| .I | Pokok Utang Luar | | | | |
| I | Negeri | | | | |
| I | | | | | |
| | Jumlah Pembiayaan | | | | |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Dari tabel diatas , dapat dilihat laporan realisasi anggaran yang telah disajikan kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun.Setelah di analisis , Laporan realisasi anggaran yang dibuat telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku yaitu PP No.71 tahun 2010.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Berikut adalah laporan operasional yang telah disajikan oleh kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun. Laporan operasionalnya belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan karena tidak dibuatnya selisih/lebih dari surplus kegiatan operasional selama satu periode pelaporan.

Tabel V.9
Laporan Operasional

| Uraian | Jumlah | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---|------------------|------------------|-------------------------|---------|
| | 2017 | 2016 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kegiatan Operasional | | | | |
| Pendapatan Operasional | | | | |
| Pendapatan Perpajakan | | | | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | | | | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | | | | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | | | | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | | | | |
| Pendapatan Cukai | | | | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | | | | |
| Pendapatan Bea Masuk | | | | |
| Pendapatan Bea Keluar | | | | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | | | | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | | | | |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | | | | |
| Pendapatan Negara bukan Pajak Lainnya | Rp.1,789,074,679 | Rp.6,043,285,078 | (Rp.4,254,210,399) | 70.39 |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | Rp.1,789,074,679 | Rp.6,043,285,078 | (Rp.4,254,210,399) | (70.39) |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Operasional | Rp.1.789,074,679 | Rp.6.043,285,078 | (Rp.4,254,210,399) | 70.39 |
| Beban Operasional | | | | |
| Beban Pegawai | Rp.2.031,506,823 | Rp.1.983,548,321 | Rp.47,958,502 | 2.41 |
| Beban Persediaan | Rp.117,024,156 | Rp.190,500,068 | (Rp.73,475,912) | (38.57) |
| Beban Barang dan Jasa | Rp.1.949,061,571 | Rp.2.197,563,158 | (Rp.248,501,587) | (11.30) |
| Beban Pemeliharaan | Rp.753,287,784 | Rp.161,459,850 | Rp.591,827,934 | 366.54 |
| Beban Perjalanan Dinas | Rp.497,707,427 | Rp.403,970,294 | Rp.93,737,133 | 23.20 |
| Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat | Rp.1.233,671,315 | Rp.1.174,245,109 | Rp.59,426,206 | 5.06 |
| Beban Bunga | | | | |
| Beban Subsidi | | | | |
| Beban Hibah | | | | |
| Beban Bantuan Sosial | | | | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | Rp.1.464,312,719 | Rp.1.400,306,318 | Rp.64,006,401 | 4.57 |
| Beban Penyisihan Utang Tak Tertagih | | | | |
| Beban Transfer | | | | |
| Beban Lain-Lain | | | | |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | Rp.8.046,571,795 | Rp.7.511,593,118 | Rp.534,978,677 | 351.92 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (Rp.6,257,497,116) | (Rp.1,468,308,040) | (Rp.4,789,189,076) | (281.52) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | Rp.4,275,000 | Rp.10,700,000 | (Rp.6,425,000) | 60.04 |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | | Rp.36,834,200 | (Rp.36,834,200) | (100.00) |
| Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | Rp.4,275,000 | (Rp.26,134,200) | Rp.30,409,200 | (116.35) |
| SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang. | | | | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang. | | | | |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA. | | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. | Rp.295,612,455 | Rp.429,240,970 | (Rp.133,628,515) | 31.13 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. | Rp.352,382,940 | Rp.396,037,204 | (Rp.43,654,264) | (11.02) |
| Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya. | (Rp.56,770,485) | Rp.33,203,766 | (Rp.89,974,251) | (270.97) |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI | (Rp.52,495,485) | Rp.7,069,566 | (Rp.59,565,051) | 202.20 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|----------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL. | NON | | |) | |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| Beban Luar Biasa | | | | | |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA. | | | | | |
| SURPLUS / (DEFISIT) – LO | (Rp.6,309,992,601) | (Rp.1,461,238,474) | (Rp.4,848,754,127) | | (79.32) |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca yang telah disajikan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Tabel V.10
Neraca

| Nama Perkiraan | Jumlah | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | 2018 | 2017 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp.90,000,000. | | Rp.90,000,000 | |
| Persediaan | Rp.414,619,447 | Rp.559,216,250 | (Rp.144,596,803) | (25.85) |
| JUMLAH ASET LANCAR | Rp.504,619,447 | Rp.559,216,250 | (Rp.54,596,803) | (9.76) |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | Rp.20,889,869,000 | Rp.20,889,869,000 | | |
| Peralatan dan Mesin | Rp.12,482,507,636 | Rp.12,560,209,949 | (Rp.77,702,313) | (0.61) |
| Gedung dan Bangunan | Rp.9,721,498,000 | Rp.9,721,498,000 | | |
| Akumulasi Penyusutan | (Rp.8,892,721,378) | (Rp.8,875,800,300) | (Rp.16,921,078) | 0.19 |
| JUMLAH ASET TETAP | Rp.34,201,153,258 | Rp.34,295,776,649 | (Rp.94,623,391) | (0.27) |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset tak Berwujud | Rp.182,350,000 | Rp.182,350,000 | | |
| Aset Lain-lain | Rp.1,205,040,673 | Rp.80,874,000 | Rp.1,124,166,673 | 1,390.02 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi | (Rp.1,355,281,923) | (Rp.226,211,500) | (Rp.1,129,070,423) | 499.12 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Aset Lainnya | | | | |
| JUMLAH ASET LAINNYA | Rp.32,108,750 | Rp.37,012,500 | (Rp.4,903,750) | (13.24) |
| JUMLAH ASET | Rp.34,737,881,455 | Rp.34,892,005,399 | (Rp.154,123,944) | (0.44) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | | Rp.20,868,178 | (Rp.20,868,178) | (100.00) |
| Uang Muka dari KPPN | Rp.90,000,000 | | Rp.90,000,000 | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | Rp.90,000,000 | Rp.20,868,178 | Rp.69,131,822 | 331.27 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | Rp.90,000,000 | Rp.20,868,178 | Rp.69,131,822 | 331.27 |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | Rp.34,737,881,455 | Rp.34,871,137,221 | (Rp.223,255,766) | (0.64) |
| JUMLAH EKUITAS | Rp.34,737,881,455 | Rp.34,871,137,221 | (Rp.223,255,766) | (0.64) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | Rp.34,737,881,455 | Rp.34,892,005,399 | (Rp.154,123,944) | (0.44) |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Tabel V.11

Laporan Perubahan Ekuitas

| URAIAN | JUMLAH | | KENAIKAN (PENURUNAN) | |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|
| | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | JUMLAH | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EKUITAS AWAL | Rp.18,337,266,752 | Rp.16,852,739,378 | Rp.1484,527,374 | 8.80 |
| SURPLUS/DEFISIT | (Rp.6,309,992,601) | (Rp.1,461,238,474) | (Rp.4,848,754,127) | 331.82 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| - LO | | | | |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MEN GURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KES ALAHAN MENDASAR | Rp.17,226,566,526 | (Rp.155,106,021) | Rp.17,381,672,547 | (11.31) |
| Penyesuaian Nilai Aset | | | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | | | | |
| Selesih Revaluasi Aset Tetap | Rp.17,119,690,939 | | Rp.17,119,690,939 | |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | Rp.106,875,587 | (Rp.155,106,021) | Rp.261,981,608 | (168.91) |
| Koreksi Lain-Lain | | | | |
| TRANSAKSI ANTAR EKUITAS | Rp.5,617,296,544 | Rp.3,100,871,869 | Rp.2,516,424,675 | 81.15 |
| KENAIKAN/PENU RUNAN EKUITAS | Rp.16,533,870,469 | Rp.1,484,527,374 | Rp.15,049,343,095 | 1,013.74 |
| EKUITAS AKHIR | Rp.34,871,137,221 | Rp.18,337,266,752 | Rp.16,533,870,469 | 90.16 |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Dari Tabel V.9 dapat kita lihat bahwa laporan perubahan ekuitas kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan

adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun tidak membuat catatan atas laporan keuangan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Proses Akuntansi di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 karena :

1. pada laporan keuangannya tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan salah satu komponen dari lima standar akuntansi pemerintahan.
2. Pada Laporan Operasional tidak dibuatnya selisih/lebih dari surplus kegiatan operasional selama satu periode pelaporan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Membuat CALK untuk mempermudah Pembaca laporan keuangan karena tidak semua pembaca itu dari kalangan akuntansi yang tidak terlalu paham jika hanya ada data berupa angka saja.
2. Mengupdate juga sistem akuntansi yang dipakai (SAIBA) setiap ada update terbaru karena akan melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya lebih baik untuk menganalisis siklus akuntansinya sampai sedetail mungkin mulai dari pernjurnalan , buku besar, neraca , dan laporan keuangannya. Bisa saja terdapat dari siklus akuntansinya memiliki permasalahan yang menarik untuk diteliti.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Anindhya Putri, Halynda. 2012. "Pengaruh Aturan Etika dan Independensi Terhadap Kepuasan Kerja Internal Auditor dengan Profesionalisme sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Internal Auditor BPKP Semarang)". Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anwar, Chairul. 2014. "Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor (Pada Perusahaan Industri di Lampung)". Jurnal Akuntansi Keuangan Vol.5 No.2, Hal 41-58.
- Arens, Alvin A., Ronald J Elder and Mark S Beasley. 2008. "Auditing dan Jasa Assurance Edisi 12 Jilid 1 (diterjemahkan oleh tim penerbit Erlangga)". Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ariawan Ramadan, Rizky. 2015. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di daerah Semarang)". Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Baihaqi, Fauzan. 2010. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Area Yogyakarta)". Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Cahyasumirat, Gunawan 2006. "Pengaruh Profesionalisme Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Internal Auditor, Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variable Intervening (Studi empiris Pada Internal Auditor PT. BANK ABC)". Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chasanah, Nur. 2009 "Analisis Pengaruh Empowerment, Self Efficacy dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada Karyawan PT. Mayora Tbk Regional Jateng Dan DIY)". Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Futri, Putu Septiani dan Gede Juliarsa. 2014. "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali. E-Jurnal Akuntansi". ISSN: 2302-8556.
- Ghozali, Imam. 2013 "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawaty, Arleen dan Yulius Kurnia Susanto. 2009. "Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi terhadap

Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11, No. 1, Hal.13-20.

Linda. 2018. “Pengaruh Aturan Etika dan Independensi Terhadap Kepuasan Kerja Internal Auditor(Studi Pada Auditor Pemerintah BPKP Perwakilan Lampung)”. Jurnal stiekrakatau. Vol 2, No.1.

Lumban Toruan, Jupri. 2015. “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman, Dan Pendidikan Terhadap Profesionalisme Auditor(Studi Empiris pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau)”. Universitas Riau, Pekanbaru.

Mulyadi. 2013. “Auditing”. Jakarta: Salemba Empat.

Pardi dan Fajar Nurayli. 2007. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Komitmen Profesi dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Semarang)”. Jurnal Akuntansi. STIE AUB Surakarta.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008, Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Sistem Pengendalian Internal.

Pusdiklatwas, BPKP, 2008. “Kode Etik Dan Standar Audit”. Diklat Pembentukan Auditor Terampil, Edisi Kelima, <http://www.bpkp.go.id>.

Rahmawati. 1997. “Hubungan Antara Profesionalisme Internal Auditor dengan Kinerja, Kepuasan Kerja, Komitmen dan Keinginan Untuk Pindah”. Tesis Program Pasca Sarjana UGM.

Ranti Cahyu, Dwi. 2013. “Pengaruh Etika, Pendidikan, Dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor Internal Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening(Studi Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)”. E-Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riduwan dan Kuncoro Engkos Ahmad. 2014. “Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)”. Bandung: Alfabeta.

Riswan. 2013. “Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening”. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Volume 16.

- Robbins, Stepent P. dan Timoty A. Judge. 2008. "Perilaku Organisasi". Jakarta:Salemba Empat.
- Rosnidah, Ida. 2011 "Analisis Dampak Motivasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah", Pekbis Jurnal, Vol.3, No.2, Hal. 456-466.
- Rotua, Riris. 2016. "Pengaruh Profesionalisme Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Dengan Struktur Audit Sebagai Pemoderasi". Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.
- Sabrina dan Indira Januarti. 2012. "Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika, dan Gender Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit Melalui Skeptisme Profesional Auditor (Studi Kasus pada KAP Big Four di Jakarta)". Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Saryanti, Endang. 2012. "Pengaruh Motivasi, Kerja dan Etika Profesi terhadap Pengambilan Keputusan Auditor". E-Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB, Surakarta.
- Sasongko, Budi. 2010. "Internal Audit dan Dilema Etika". <http://www.theAkuntan.com>.
- Septiani, FitriPutu dan Juliarsa Gede, 2014. "Pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Bali". Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7(2): h: 444-461.
- Sugiyono. 2016. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: CV Alfabeta.
- Sumardi. 2001. "Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja". Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutrisno, Edy. 2009. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta, Kencana.
- Tranggono, Rahadyan Pobo dan Andi Kartika. 2008. "Pengaruh Komitmen Organisasional dan Profesional terhadap Kepuasan Kerja Auditor dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening". Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 15, No. 1, Hal. 80-90.
- Umam, Khaerul. 2010. "Perilaku Organisasi". Edisi Pertama, Bandung:Pustaka Setia.
- Yendrawati, R. 2008. "Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan". Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 7 No. 2, hal: 219-242, Juli.